

BAB II

PENELITIAN TERDAHULU DAN TINJAUAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Muliari dan Ery Setiawan (2011) dengan Judul Pengaruh Presepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur dengan menggunakan analisis regresi linier berganda memaparkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama denpasar timur. Hal ini dapat dilihat dari besarnya $t_{hitung} = 6,171 > t_{tabel} = 1,9$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada $\alpha = 0,025$. Begitu juga dengan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama denpasar timur. Hal ini dilihat dari besarnya $t_{hitung} = 5,912 > t_{tabel} = 1,98$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada $\alpha = 0,025$.

Jotopurnomo dan Mangoting (2013) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda memaparkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Sawahan Surabaya.

Rantung dan Adi (2009) dengan judul Dampak Program *Sunset Policy* Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga) dengan menggunakan analisis data regresi sederhana memaparkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijakan *sunset policy* memberikan pengaruh positif terhadap ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Kebijakan *sunset policy* direspon secara positif oleh wajib pajak, yaitu dengan semakin meningkatnya kemauan membayar pajak. Hal ini berarti harapan terjadinya penerimaan pajak yang signifikan dari adanya kebijakan ini bukanlah sesuatu yang mustahil.

Sasongko (2014) memaparkan hasil penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali) dengan menggunakan analisis regresi berganda, berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan persepsi mempunyai pengaruh kemauan membayar pajak. Sedangkan untuk pengujian F test diketahui bahwa variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman dan persepsi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap kemauan membayar pajak, hal ini berarti model regresi “FIT” dan dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

Jatmiko (2006) dengan judul Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda memaparkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan dari peneliti sebelumnya adalah penelitian ini menambahkan satu variabel yang berupa suatu fasilitas yang dikeluarkan oleh Direktorat jendral Pajak pada tahun 2015 yaitu penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi pajak atau yang lebih dikenal dengan TPWP 2015.

B. Tinjauan Teori

1. Ruang Lingkup Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2006:1). Dari pengertian tersebut pajak merupakan suatu iuran rakyat kepada negara yang bersifat wajib (didukung dengan kekuatan undang-undang dan pelaksanaannya) dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, dan oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan untuk membangun suatu negara. yang berhak memungut pajak adalah negara. iuran yang dimaksud adalah hanya berupa uang bukan barang.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak ada dua, yang *pertama* adalah fungsi *budgetair* dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (Mardiasmo, 2006:1). Iuran yang sudah dibayarkan oleh masyarakat kepada negara akan digunakan oleh negara untuk membiayai negara dalam membangun suatu negara untuk mewujudkan suatu negara yang berkembang. Fungsi yang *kedua* yaitu pajak berfungsi mengatur maksudnya pajak sebagai suatu alat yang mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Sebagai contoh, tarif pajak untuk ekspor adalah 0% kebijakan ini dikeluarkan pemerintah untuk mendorong wajib pajak yang melakukan kegiatan ekspor impor dapat mendorong ekspor produk indonesia pada pasar internasional.

c. Menunjang *Self Assesment System*

Pada dasarnya sistem *self assesment* sudah lama dimulai, yaitu pada saat diterapkannya MPS (menghitung pajak sendiri) dan MPO (menghitung pajak orang). Sistem ini sudah diterapkan pada saat reformasi perpajakan yaitu pada tahun 1983. *Self assesment* adalah menyerahkan sepenuhnya kewajiban perpajakan pada wajib pajak diantaranya menghitung, melaporkan dan menyetorkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya sistem ini didasari dengan rasa kejujuran dari wajib pajak dan apabila fiskus menganggap bahwa pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak tidak benar maka fiskus mempunyai wewenang untuk memeriksa dan akan diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang jika ditemukan kesalahan yang disengaja oleh wajib pajak.

2. Kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP).

Pengertian penghapusan sanksi administrasi pajak atau yang lebih dikenal dengan TPWP 2015 menurut peraturan kementerian republik indonesia nomor 29/PMK.03/2015 penghapusan sanksi administrasi pajak adalah penghapusan atas sisa sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak. Kebijakan ini diatur dalam pasal 36 ayat (1) huruf a undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang diresmikan oleh presiden Republik Indonesia Rabu, 29 April 2015 yang lalu dengan motto *Reach the unreachable, Touch the Untouchable*. Secara umum kebijakan TPWP mempunyai tujuan yang sama dengan kebijakan *sunset policy* yang diberlakukan pada tahun 2008 silam yaitu menghapuskan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan atau pembetulan SPT Tahunan. Dan hukum yang mendasari TPWP sendiri adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 karena sifatnya yang terbuka melalui undang-undang KUP maka dibutuhkan peraturan yang lebih rinci melalui Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

Jika insentif yang diberikan oleh kebijakan *sunset policy* pada tahun 2008 silam hanya sebatas PPh, namun dalam kebijakan TPWP di tahun 2015 ini insentif yang diberikan yaitu untuk semua jenis pajak. adapun perbedaan kebijakan *sunset policy* 2008 dengan TPWP 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perbedaan *Sunset Policy* 2008 dengan TPWP 2015

	<i>sunset policy</i> 2008	TPWP 2015
Insentif yang diberikan Peraturan Dasar hukum	PPh pasal 37 A KUP PMK Nomor 18/PMK.03/2008	Semua jenis pajak Pasal 36 ayat (1) huruf a KUP PMK Nomor 91/PMK.03/2015 dan PMK 29/PMK.03/2015

3. Kesadaran Wajib Pajak

Jatmiko, (2006) *dalam* Mutia, (2014) mengemukakan beberapa bentuk kesadaran yang mendorong wajib pajak dalam membayar pajaknya. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan adanya pemikiran seperti itu kesadaran dalam membayar pajak akan meningkat, karena wajib pajak tidak akan merasa dirugikan. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. dengan adanya pemikiran yang seperti ini wajib pajak akan sadar bahwa penundaan pembayaran pajak akan memperlambat pembangunan negara, karena pajak sendiri adalah merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan sebagai pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak tidak akan menunda kewajiban membayar pajaknya karena wajib pajak itu sendiri sadar bahwa pajak memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang.

Jatmiko, (2006) *dalam* Mutia, (2014) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Kendala yang sering kali menjadi masalah dalam pengumpulan pajak dari masyarakat adalah dari kesadaran masyarakat atas pentingnya membayar pajak (Jatmiko, 2006 *dalam* Sri Putri, 2014). Dalam hal

meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui penyuluhan dan penerangan hanya akan berhasil apabila timbul rasa kepercayaan bahwa pajak yang dibayarkan adalah untuk digunakan sebagai pembangunan nasional. Namun persepsi setiap orang mengenai perpajakan sangatlah berbeda-beda dan masih dipengaruhi oleh faktor-faktor subyektif seperti keadilan dalam menanggung beban pajak dan menikmati hasil yang diciptakan oleh pajak.

4. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Maksud dari pemahaman tentang peraturan perpajakan disini adalah semakin paham wajib pajak tentang peraturan perpajakan maka semakin taat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, begitu sebaliknya semakin rendah tingkat pemahaman wajib pajak maka cenderung wajib pajak tidak taat terhadap kewajiban membayar pajaknya.

Dengan demikian wajib pajak yang benar-benar paham akan peraturan perpajakan mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan bahkan sanksi pidana apabila mereka tidak melaporkan atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.

5. Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah sebuah tindakan yang berupa hukuman diperuntukkan oleh orang-orang yang melanggar peraturan yang berlaku agar merasa jera dan tidak mengulangi kembali. Disini peraturan atau undang-undang sebagai panduan seseorang mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Undang-undang dibuat sebagai pedoman dan tidak untuk

dilanggar. Dan sanksi sendiri dibuat bagi orang-orang yang melakukan tindakan yang melanggar undang-undang yang sudah berlaku. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Muliari dan Setiawan, 2010 *dalam* Harjanti Puspa, 2012).

6. Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah suatu tindakan membantu mengurus dan menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh seseorang. Sementara fiskus sendiri adalah petugas pajak. Yang dimaksud kualitas pelayanan disini adalah bagaimana cara petugas pajak dalam membantu menyiapkan atau mengurus segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pelayanan yang baik sangatlah dibutuhkan oleh wajib pajak, karena dengan demikian wajib pajak merasa tidak sulit dan mau untuk membayar pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak banyak hal yang bisa dilakukan misalnya dengan sosialisasi dan penyuluhan yang diadakan oleh fiskus pajak.

Ilyas dan Burton (2010) *dalam* Arum (2012) menjelaskan bahwa meskipun kampanye dan penyuluhan perpajakan telah dilakukan oleh direktorat jendral pajak, cara yang dirasa paling baik untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami pentingnya pajak, dan akhirnya mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah melalui pelayanan.

7. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut kamus besar bahasa indonesia kepatuhan bersal dari kata dasar patuh yang berarti suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin sementara kepatuhan yaitu sifat patuh; ketaatan. Wajib pajak menurut wikipedia adalah orang pribadi atau badan (subyek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Kepatuhan wajib pajak adalah sifat taat dan patuh terhadap undang-undang perpajakan dalam melakukan kewajiban perpajakan baik itu wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan.

Kiryanto (2000) *dalam* Jatmiko (2006) pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Kriteria wajib pajak yang dikatakan patuh menurut keputusan menteri keuangan no.544/KMK.04/2000, adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi.

8. Pengembangan Hipotesis

- a. Kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Penghapusan sanksi administrasi pajak pada dasarnya dikeluarkan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan yaitu wajib pajak diberi kebebasan untuk membetulkan SPT sebelumnya. Pemberian sanksi administrasi ini juga karena kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Jika wajib pajak ingin membenarkan SPT maka harus melewati berbagai syarat-syarat untuk mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak. jika wajib pajak menganggap bahwa pembetulan ini dirasa sulit dan memakan waktu maka wajib pajak tidak akan melakukan kesalahan dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak. dari beberapa uraian diatas maka diduga kebijakan TPWP tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

H_1 = Kebijakan tahun pembinaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

b. Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran adalah unsur yang tumbuh dari dalam diri manusia dalam memahami dan menyikapi realitayang ada. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010, *dalam* Lovihan, 2014). Kesadaran yang tinggi itu sendiri tidak lain muncul dalam diri wajib pajak. Apabila kesadaran yang tinggi dan memotivasi untuk membayar pajak itu muncul dalam diri, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan mengakibatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan akan meningkat serta wajib pajak akan patuh dan mau untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_2 = Kesadaran wajib pajak diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

c. Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Wajib pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan jelas akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh terhadap perpajakan. Dan sebaliknya wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan jelas akan menjadi wajib pajak yang patuh dan tidak melalaikan kewajibannya sebagai wajib pajak, karena wajib pajak paham akan sanksi yang diterima apabila melalaikan

kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_3 = Pemahaman perpajakan diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

d. Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Pada dasarnya orang patuh karena adanya peraturan dan orang tidak akan melanggar peraturan karena akan di beri sanksi atau hukuman. Dalam hal ini wajib pajak akan merasa dirugikan jika harus membayar sanksi akibat pelanggaran yang dilakukan. Semakin berat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak maka sanksi yang diberikan akan semakin berat. Jika wajib pajak memandang yang sedemikian rupa maka, diduga sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H_4 = Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

e. Kualitas Pelayanan Berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Surliani dan Kardinal (2014) kualitas pelayanan adalah kemampuan suatu pihak yang menawarkan manfaat kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud untuk memenuhi pengharapan dan kebutuhan dari pihak lain tersebut. Disini yang dimaksud adalah pelayanan fiskus kepada wajib pajak untuk membantu mengurus dan menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Pelayanan yang baik sangatlah dibutuhkan oleh wajib pajak, karena dengan demikian wajib pajak merasa tidak sulit dan mau untuk membayar pajak. Pelayanan dikatakan bermutu apabila telah

memenuhi atau melebihi harapan dari pelanggan. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik tergantung pada bagaimana petugas pajak membarikan kualitas mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. petugas pajak yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. dan untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang baik petugas harus mempunyai pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman dibidang perpajakan serta memahami perundang-undangan perpajakan. Dari berbagai uraian diatas maka diduga kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H_5 = Kualitas pelayanan diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

9. Kerangka Pikir

Berdasarkan pada uraian hipotesis maka didapat suatu rangka pemikiran sebagai berikut:

